

DPRD Buton Selatan Tetapkan Rapat Paripurna HUT ke-12 Busel Digelar 22 Juli 2026, Jadi Momentum Evaluasi Daerah



Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan
La Ode Nurunani

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan menetapkan rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Buton Selatan akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setelah berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna menyelaraskan seluruh agenda peringatan hari jadi daerah.

Penetapan jadwal itu dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menjadwalkan upacara resmi HUT ke-12 pada Kamis, 23 Juli 2026. Dengan demikian, rapat paripurna digelar sehari lebih awal agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara tert-

Lanjut ke Hal: 7

HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak 400 Peserta Prolanis Budayakan Hidup Sehat di Kotamara Baubau



Laporan: Firman

BAUBAU, BP -BPJS Kesehatan Cabang Baubau menggelar Semarak Gerak Sehat Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diikuti sekitar 400 peserta dari 30 Klub Prolanis di kawasan Alun-alun Kotamara, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 BPJS Kesehatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya hidup sehat sekaligus

menekan risiko penyakit kronis melalui pendekatan promotif dan preventif.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Sarman Palipadang, mengatakan Prolanis merupakan salah satu program unggulan BPJS Kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup peserta yang menderita hipertensi dan diabetes melitus. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pi-

Lanjut ke Hal: 7

HEADLINE NEWS

**MENTERI KEBUDAYAAN
FADLI ZON
DORONG PELESTARIAN
BENTENG KERATON BUTON,
SEBUT MAHAKARYA
PERADABAN NUSANTARA**

Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pelestarian warisan budaya Kesultanan Buton saat mengunjungi Kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton di Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu (12/7/2026).

Benteng Keraton Buton panjang ± 2.750 meter, salah satu benteng terluas di dunia.

Dibangun oleh masyarakat Buton tanpa campur tangan bangsa kolonial.

Tinjau situs bersejarah: Makam Sultan Murhum, batu air, Popaua, dan meriam kuno.

Usulkan Sultan Buton ke-20 dan ke-23 sebagai Pahlawan Nasional.

Kompleks Makam Sultan Murhum diproyeksikan jadi kawasan Cagar Budaya Nasional.

Benteng ini dibangun bukan oleh Belanda ataupun Portugis, tetapi oleh masyarakat Buton sendiri. Ini menunjukkan kemampuan dan kehebatan orang Nusantara dalam membangun sistem pertamanan yang luar biasa.

- Dr. FADLI ZON
Menteri Kebudayaan RI

JAGA WARISAN BUDAYA, PERKUAT IDENTITAS BANGSA, KENALKAN INDONESIA KE DUNIA

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pelestarian warisan budaya Kesultanan Buton saat mengunjungi Kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu (12/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyebut benteng bersejarah itu sebagai mahakarya arsitektur asli Nusantara yang menjadi bukti kemajuan peradaban masyarakat Buton sekaligus aset budaya nasional yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.(*)

Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton Buton yang telah berstatus Cagar Budaya Nasional merupakan hasil karya masyarakat Buton tanpa campur tangan bangsa kolonial. Benteng sepanjang sekitar 2.750

Lanjut ke Hal: 7

Polres dan Kejari Baubau Perkuat Sinergi Demi Penegakan Hukum Berkualitas



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP -Kepolisian Resor (Polres) Baubau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau mempertegas komitmen memperkuat sinergitas penegakan hukum melalui audiensi dan silaturahmi yang digelar di Kantor Kejari Baubau, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Criminal Justice System) guna menghadirkan

pelayanan hukum yang profesional, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, Taufiq Djalal, S.H., M.H., menegaskan bahwa hubungan kerja antara Kejaksaan dan Kepolisian bukanlah program baru, melainkan amanat undang-undang yang telah menjadi bagian dari sistem penegakan hukum nasional. Menurutnya, koordinasi yang baik antara

penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum menjadi fondasi penting dalam menghasilkan proses hukum yang berkualitas.

“Hasil penyidikan yang baik akan melahirkan penuntutan yang baik, dan penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Karena itu, sinergi merupakan sebuah keharusan. Tujuan kita sama, yakni memberikan rasa aman dan rasa keadilan kepada masyarakat,” te-

Lanjut ke Hal: 7

HUT Ke-67 Buton, Bupati Alvin Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Kolaborasi



Bupati Buton Alvin Akawijaya

Laporan: Firman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Buton sebagai momentum memperkuat persatuan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Buton yang

dirangkaikan dengan peringatan 23 tahun Pasarwajo sebagai ibu kota Kabupaten Buton di Alun-Alun Takawa, Pasarwajo, Sabtu (4/7/2026).

Dalam amanatnya, Alvin menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, mulai dari Forkopimda, DPRD,

Lanjut ke Hal: 7

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Pelestarian Benteng Keraton Buton, Sebut Mahakarya Peradaban Nusantara

meter itu diselesaikan pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-5 dan hingga kini dikenal sebagai salah satu benteng terluas di dunia yang dibangun oleh masyarakat lokal. “Benteng ini dibangun bukan oleh Belanda ataupun Portugis, tetapi oleh masyarakat Buton sendiri. Ini menunjukkan kemampuan dan kehebatan orang Nusantara dalam membangun sistem pertahanan yang luar biasa,” ujar Fadli Zon.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kebudayaan didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., serta Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. Rombongan meninjau sejumlah situs penting di kawasan benteng, antara lain Makam Sultan Murhum, batu air yang digunakan sebagai tempat pemandian calon sultan, batu pijakan (Popaua) untuk prosesi pengambilan sumpah Sultan, serta

meriam-meriam kuno yang masih terpelihara di sepanjang benteng.

Fadli Zon mengatakan pemerintah tengah membuka peluang pengusulan Sultan Buton ke-20 dan Sultan Buton ke-23 sebagai Pahlawan Nasional. Selain itu, sejumlah situs bersejarah, termasuk kompleks Makam Sultan Murhum, juga diproyeksikan untuk diusulkan menjadi bagian dari kawasan Cagar Budaya Nasional. “Kita berharap ke depan dapat bekerja sama untuk kemajuan nasional melalui perlindungan, konservasi, pengembangan, dan pemanfaatan situs-situs bersejarah ini,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kualitas konstruksi Benteng Keraton Buton yang memanfaatkan batu karang dan batu kapur sebagai material utama. Benteng tersebut diperkuat dengan 12 lawa atau pintu gerbang serta 16 baluarte yang berfungsi sebagai sistem pertahanan. Menurutnya, tata ruang kawasan yang berada di puncak bukit menunjukkan kemampuan mas-

yarakat Buton dalam merancang sistem pertahanan sekaligus pusat pemerintahan yang terencana. “Warisan seperti ini harus terus dijaga karena menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia,” tegasnya.

Secara historis, Benteng Keraton Buton dibangun secara bertahap sejak abad ke-16 pada masa kejayaan Kesultanan Buton dan menjadi pusat pemerintahan, pertahanan, serta penyebaran Islam di wilayah Kepulauan Buton. Dalam sejarah dunia, benteng-benteng besar umumnya dibangun oleh kekuatan kolonial atau kerajaan besar di Eropa dan Asia. Keberadaan Benteng Keraton Buton menjadi istimewa karena lahir dari kemampuan masyarakat lokal Nusantara dengan teknologi dan sumber daya sendiri, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan peradaban maritim Indonesia.

Kunjungan kerja Menteri Kebudayaan ditutup dengan ra-

mah tamah bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Fadli Zon beserta rombongan menikmati kuliner khas Buton berupa jagung rebus dan kambingase yang disajikan sebagai produk unggulan PRJ Sorawolio. Sehari sebelumnya, Sabtu (11/7/2026), Pemerintah Kota Baubau juga menggelar malam ramah tamah bersama Menteri Kebudayaan RI dan Menteri Haji dan Umrh di Istana Malige sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Baubau.

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah berharap sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Baubau semakin kuat dalam menjaga, mengembangkan, serta memanfaatkan warisan sejarah Kesultanan Buton. Langkah itu diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya nasional, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata sejarah Indonesia di tingkat internasional. (*)

DPRD Buton Selatan Tetapkan Rapat Paripurna HUT ke-12 Busel Digelar 22 Juli 2026, Jadi Momentum Evaluasi Daerah

dan sesuai agenda yang telah disusun bersama.

Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Banmus DPRD dan pemerintah daerah setelah melalui sejumlah rapat koordinasi. Menurutnya, sinkronisasi jadwal menjadi langkah penting agar seluruh tahapan peringatan dapat berjalan efektif.

“DPRD melalui Badan Musyawarah telah menyepakati pelaksanaan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Buton Selatan pada Rabu, 22 Juli 2026,” ujar La Ode Nurunani saat diwawancarai awak media Baubau Post, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemer-

intah Kabupaten Buton Selatan telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi selama masa persiapan HUT ke-12. Pertemuan tersebut difokuskan untuk mematangkan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk penyesuaian jadwal paripurna dan upacara resmi.

“Rapat paripurna dilaksanakan sehari sebelum upacara agar seluruh rangkaian peringatan dapat berjalan sesuai agenda yang telah disusun,” jelasnya.

Lebih lanjut, La Ode Nurunani menegaskan DPRD siap mendukung seluruh kegiatan peringatan HUT ke-12 sebagai momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong ke-

majuan Kabupaten Buton Selatan.

“Momentum hari jadi ini bukan hanya seremoni, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan penguatan kolaborasi demi kemajuan Buton Selatan,” katanya.

Secara historis, Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak diresmikan pada 23 Juli 2014, pemerintah daerah terus melakukan pembangunan kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur sebagai fondasi percepatan pembangunan wilayah. (*)

HUT Ke-67 Buton, Bupati Alvin Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Kolaborasi

tur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat luas agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

“Hari jadi ini adalah milik seluruh masyarakat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat semangat persatuan, gotong royong, dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Alvin.

Bupati menilai, peringatan hari jadi bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang refleksi untuk menghargai jasa para pendahulu sekaligus memperkuat tekad bersama dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Buton. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan di daerah tersebut.

“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai pemerintah sendiri. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat agar setiap program berjalan optimal,” ujar Alvin.

Memasuki usia ke-67 tahun, Kabupaten Buton dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong inovasi, serta memastikan pemerataan pembangunan sebagai fondasi menuju daerah yang maju, berdaya saing, mandiri, dan sejahtera.

“Kami akan terus menghadirkan pelayanan terbaik serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi utama pembangunan Kabupaten Buton,” tegas Alvin.

Secara historis, Kabupaten Buton diben-

tuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Regulasi tersebut menjadi tonggak lahirnya Kabupaten Buton sebagai daerah otonom yang kemudian berkembang melalui berbagai kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Pasarwajo resmi menjadi ibu kota Kabupaten Buton sejak 23 tahun lalu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui momentum Hari Jadi ke-67 ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kolaborasi terus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan sekaligus mempercepat terwujudnya Kabupaten Buton sebagai daerah yang semakin maju, kompetitif, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (*)

HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak 400 Peserta Prolanis Budayakan Hidup Sehat di Kotamara Baubau

hak, mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga pemerintah daerah.

“Keberhasilan Prolanis tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan maupun tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan komitmen peserta, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan pola hidup sehat,” kata Sarman.

Ia menjelaskan, pendekatan yang dikembangkan dalam Prolanis tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif agar peserta terhindar dari komplikasi penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Per-

tama (FKTP) se-Kota Baubau, serta ratusan peserta yang didominasi kalangan lanjut usia (lansia) dan penyandang penyakit kronis. Sejak pukul 06.30 Wita, peserta mengikuti jalan sehat mengelilingi kawasan Kolang Bundar Kotamara yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon sebagai simbol dimulainya kampanye hidup sehat dan senam Prolanis bersama.

Sekda Kota Baubau La Ode Darussalam memberikan apresiasi terhadap konsistensi BPJS Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan menjadi modal penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang tetap konsisten

menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi seluruh fasilitas kesehatan yang terus mendukung pelaksanaan Program JKN,” ujar La Ode Darussalam.

Ia mengingatkan bahwa hipertensi dan diabetes melitus masih menjadi dua penyakit kronis yang banyak ditemukan di masyarakat. Karena itu, olahraga teratur, pola makan seimbang, serta pemeriksaan kesehatan berkala harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Olahraga rutin, menjaga pola makan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk mencegah penyakit kronis,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Baubau juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra ker-

ja. Puskesmas Liwuto menerima penghargaan sebagai Klub Prolanis Teraktif sekaligus Pengelola Prolanis Terbaik, sedangkan Puskesmas Lakologou meraih penghargaan sebagai FKTP dengan tingkat keaktifan Program Rujuk Balik (PRB) tertinggi.

Program Prolanis kemudian dikembangkan sebagai strategi nasional untuk mengendalikan penyakit kronis yang menjadi penyebab utama beban pembiayaan kesehatan. Secara global, World Health Organization (WHO) menempatkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke sebagai penyebab sekitar 74 persen kematian di dunia, sehingga upaya promotif dan preventif melalui aktivitas fisik rutin serta deteksi dini menjadi strategi yang terus didorong berbagai negara. (*)

Polres dan Kejari Baubau Perkuat Sinergi Demi Penegakan Hukum Berkualitas

gas Taufiq.

Rombongan Polres Baubau dipimpin Wakapolres Kompol Andi Usri, S.H., M.H., mewakili Kapolres Baubau. Ia didampingi Kabag Ops Kompol Anwar, Kabag SDM AKP Haerun Ali, Kasat Intelkam AKP H. Bustan, Kasat Reskrim AKP Gayuh Pambud-

hi Utomo, Kasipropam AKP Syamsuddin, Kasihumas Iptu Rino, KBO Sat Intelkam Ipda Jamaluddin, serta Kapolsek Murhum Ipda Ld. Moch Ikhsan. Kehadiran rombongan disambut langsung Kajari Baubau bersama jajaran.

Dalam audiensi tersebut, kedua institusi

membahas penguatan koordinasi penanganan perkara, peningkatan komunikasi antarlembaga, hingga upaya memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Pembahasan juga diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum melalui pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kepoli-

sian dan Kejaksaan.

Wakapolres Baubau Kompol Andi Usri mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan agar hubungan antarlembaga penegak hukum terus dipererat melalui komunikasi yang intensif dan kerja sama yang berkesinambungan.

semakin meningkat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting agar koordinasi antarlembaga semakin efektif dalam setiap tahapan penegakan hukum,” kata Andi Usri.

Secara historis, penguatan sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan merupakan implementasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang mulai berkembang di berbagai negara sejak dekade 1960-an sebagai model koordinasi antarlembaga penegak hukum. Di Indonesia, konsep tersebut semakin diperkuat melalui Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981, yang mengatur keterkaitan fungsi penyidikan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan agar proses peradilan berjalan efektif, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu ditutup dengan sesi foto bersama dan “Jabat Tangan Sinergitas” sebagai simbol komitmen Polres Baubau dan Kejari Baubau untuk terus menjaga soliditas dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Kota Baubau. (*)

Pansus DPRD Gowa Tetap Lanjutkan Hak Angket Meski Bupati Gowa Sitti Husniah Tinggalkan Sidang



Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang walk out atau meninggalkan ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Gowa sebelum agenda pemeriksaan selesai

Laporan: Rahmat

MAKASSAR, BP- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa memastikan tetap melanjutkan penyusunan kesimpulan hasil penyelidikan meski Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang meninggalkan ruang sidang sebelum agenda pemeriksaan selesai pada Selasa (14/7). Pansus menilai kehadiran bupati dalam sidang telah memenuhi undangan resmi sehingga proses hak angket tetap dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, mengatakan tidak ada lagi agenda pemanggilan terhadap Bupati Gowa setelah sidang tersebut. Menurutnya, pansus akan segera menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan sejak tahap rapat dengar pendapat umum hingga sidang klarifikasi.

“Kita sudah anggap bahwa selesai untuk Ibu Bupati pemanggilannya pada hari ini karena dia sudah hadir,” ujar Kasim. Ia menambahkan, kehadiran maupun ketidakhadiran pihak yang dipanggil tidak menghalangi pansus dalam menyusun rekomendasi akhir hasil penyelidikan.

Hak angket DPRD Gowa dibentuk untuk mendalami tiga persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan

dalam pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pihak Bupati Gowa menjelaskan bahwa keputusan meninggalkan ruang sidang bukan dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan. Tim kuasa hukum menilai mekanisme pemeriksaan yang diterapkan tidak memberikan ruang yang cukup bagi kliennya untuk menyampaikan keterangan secara proporsional.

Kuasa hukum Bupati Gowa, Amirullah Mappaero, mengatakan Husniah sejak awal telah mempersiapkan diri memenuhi undangan DPRD. Namun, pihaknya meminta agar seluruh pertanyaan disampaikan secara kolektif dan pembahasan dibatasi pada kebijakan pemerintahan, bukan memasuki ranah pribadi.

“Ibu meminta hak-haknya dipenuhi, yakni pertanyaan disampaikan secara kolektif dan pembahasannya pada ranah kebijakan. Permintaan itu tidak dipenuhi,” kata Amirullah.

Kuasa hukum lainnya, Arie Dumais, menambahkan bahwa permintaan tersebut didasarkan pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menurutnya memberikan kesempatan kepada pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan

jawaban secara lisan maupun tertulis. Ia juga menilai terdapat sejumlah pertanyaan yang telah bergeser dari substansi hak angket.

“Kami melihat ada ketidakadilan dalam proses yang berjalan. Karena itu tim kuasa hukum memutuskan untuk menarik diri atau walk out dari persidangan,” ujar Arie.

Selain menyoroti mekanisme pemeriksaan, tim kuasa hukum juga membandingkan proses yang dijalani Husniah dengan pemeriksaan terhadap saksi lain yang sebelumnya dilakukan secara tertutup. Menurut mereka, perbedaan perlakuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menghentikan keikutsertaan dalam sidang. Meski demikian, mereka menegaskan kehadiran Husniah merupakan bentuk iktikad baik memenuhi panggilan DPRD, sedangkan kemungkinan memenuhi pemanggilan berikutnya akan dipertimbangkan setelah mempelajari mekanisme yang akan ditempuh pansus.

Secara historis, hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan legislatif yang telah lama dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di tingkat daerah, kewenangan DPRD menggunakan hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sarana untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas terhadap

dap masyarakat.

Penggunaan hak angket di Indonesia telah beberapa kali menjadi bagian dari dinamika politik, baik di DPR RI maupun DPRD. Salah satu hak angket yang banyak menyita perhatian publik di tingkat nasional adalah Hak Angket Bank Century pada 2009 yang melibatkan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Di berbagai daerah, hak angket juga pernah digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepala daerah dalam sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota lembaga tersebut hadir untuk menyampaikan laporan perkembangan terbaru kondisi ekonomi Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa petang, 14 Juli 2026,” ujar Teddy melalui keterangan yang disampaikan dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut mendampingi Presiden. Dari jajaran DEN hadir sejumlah ekonom dan tokoh nasional seperti Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nu-

Prabowo Bahas Strategi Ekonomi Nasional Bersama DEN, Soroti Transformasi Digital Pemerintah, Luhut hingga Chatib Basri Hadir



BOGOR, BP- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional, tantangan ekonomi global, serta penguatan transformasi digital pemerintahan melalui penyempurnaan sistem GovTech.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota lembaga tersebut hadir untuk menyampaikan laporan perkembangan terbaru kondisi ekonomi Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa petang, 14 Juli 2026,” ujar Teddy melalui keterangan yang disampaikan dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut mendampingi Presiden. Dari jajaran DEN hadir sejumlah ekonom dan tokoh nasional seperti Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nu-

graha, serta Pantro Pander Silitonga.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah memperkuat strategi pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi internasional, mulai dari perubahan kebijakan perdagangan global, tekanan geopolitik, hingga perlambatan ekonomi sejumlah negara besar.

Dewan Ekonomi Nasional dalam laporannya menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia sekaligus memberikan sejumlah masukan strategis mengenai kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan.

“DEN melaporkan perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Teddy.

Selain sektor ekonomi, pembahasan juga mencakup perkembangan penyempurnaan GovTech atau Government Technology sebagai instrumen percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Menurut Teddy, penguatan GovTech diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan berbasis data yang lebih akurat, sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

“Penyempurnaan layanan pemerintahan berbasis digital diarahkan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan berbagai program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” jelas Teddy.

Melalui pengembangan GovTech, pemerintah berharap kesalahan dalam pendataan penerima manfaat dapat ditekan, sementara efektivitas berbagai program bantuan sosial dan layanan publik dapat meningkat.

Langkah digitalisasi pemerintahan tersebut

memiliki kaitan dengan agenda reformasi birokrasi Indonesia yang telah berkembang sejak awal 2000-an. Pemerintah sebelumnya telah mendorong konsep e-government melalui berbagai kebijakan nasional sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan masyarakat.

Secara historis, transformasi digital pemerintahan juga menjadi tren global. Sejumlah negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura telah lebih dahulu mengembangkan layanan publik digital yang terintegrasi sebagai bagian dari modernisasi negara.

Dalam konteks ekonomi global, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang serupa dengan banyak negara lain setelah pandemi Covid-19, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan investasi, serta mempercepat adaptasi teknologi.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan DEN menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, ekonom, dan lembaga strategis negara dalam merumuskan kebijakan menghadapi perubahan ekonomi dunia.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap strategi pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan data yang kuat, birokrasi yang modern, serta kebijakan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Teddy menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan digital menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

“Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan,” pungkas Teddy.(RAH)

Gubernur Sultra ASR Pastikan RKAB Tambang MBLB Disetujui Jika Taat Reklamasi



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan akan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sepanjang kewajiban hukum dipenuhi, terutama penyediaan dana jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat menerima audiensi para pengusaha tambang MBLB yang mengajukan permohonan RKAB di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (10/7/2026). Pertemuan itu juga membahas strategi meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah di tengah semakin terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut Gubernur, pemerintah daerah tidak bermaksud mempersulit proses penerbitan RKAB. Sebaliknya, Pemprov Sultra berkomitmen mempercepat pelayanan sepanjang persyaratan administratif maupun teknis telah dipenuhi oleh pelaku usaha.

"Saya hanya ingin teman-teman pengusaha menunaikan kewajibannya dan berkontribusinya terhadap daerah. Jika persyaratan itu dipenuhi, pasti permohonan RKAB-nya akan disetujui," tegas Andi Sumangerukka.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi bukan hanya merupakan tuntutan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan lingkungan pascatambang. Kebijakan terse-

but sekaligus menjadi bentuk implementasi prinsip pertambangan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta agar dana jaminan reklamasi ditempatkan di Bank Sultra. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan likuiditas perbankan lokal.

"Kami berharap dana jaminan reklamasi ditempatkan di Bank Sultra agar manfaat ekonominya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Andi Sumangerukka mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat mengoptimalkan setiap sumber pendapatan yang masih menjadi kewenangan provinsi. Pasalnya, sebagian besar kewenangan pengelolaan pertambangan kini telah berada di tangan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini hanya memiliki kewenangan pada sektor tertentu, seperti pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak alat berat. Karena itu, setiap potensi penerimaan daerah harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi.

"Untuk tambang mineral logam, kewenangan kita hanya tersisa pada beberapa jenis pajak daerah. Di sisi lain, kita tetap dituntut memiliki kemandirian fiskal," kata Gubernur.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sektor pertambangan Sulawesi Tenggara setiap tahun memberikan kontribusi sekitar Rp118 triliun kepada pemerintah pusat. Namun, besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali

ke daerah justru mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun 2025, Sultra masih menerima DBH sekitar Rp800 miliar. Memasuki tahun 2026, jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp207 miliar. Penurunan ini berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Akibat berkurangnya penerimaan tersebut, kapasitas APBD Sultra ikut mengalami kontraksi. Dari lebih dari Rp5 triliun pada tahun 2025, APBD tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp4 triliun. Sebagian besar anggaran, yakni sekitar Rp3 triliun, terserap untuk belanja operasional sehingga ruang fiskal pembangunan fisik hanya tersisa sekitar Rp1 triliun.

Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kewajiban reklamasi mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang yang diterbitkan pada 23 Oktober 2025. Berdasarkan aturan tersebut, standar biaya reklamasi revegetasi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp211,3 juta per hektare, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp199,3 juta per hektare.

"Regulasi ini harus dipatuhi bersama karena menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha," ujar Gubernur.

Menanggapi arahan tersebut, para pengusaha tambang MBLB menyatakan menerima seluruh ketentuan yang dirumuskan pemerintah daerah. Mereka menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban penyediaan dana jaminan reklamasi seka-

ligus menempatkan dana tersebut di Bank Sultra sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi daerah.

Secara historis, kebijakan reklamasi tambang di Indonesia telah mengalami penguatan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagai kewajiban mutlak bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan guna menjamin pemulihan fungsi lingkungan setelah kegiatan eksploitasi berakhir.

Dalam konteks internasional, penerapan jaminan reklamasi telah menjadi praktik umum di berbagai negara penghasil mineral seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Chile. Negara-negara tersebut mewajibkan perusahaan

tambang menyediakan dana jaminan sebelum kegiatan produksi dimulai sebagai instrumen untuk memastikan proses rehabilitasi lahan tetap terlaksana meskipun perusahaan menghentikan operasinya. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip sustainable mining yang terus didorong oleh berbagai organisasi internasional sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan pelaku usaha, Pemprov Sultra berharap proses persetujuan RKAB dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan perlindungan lingkungan hidup. (*)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Muna Simpan Lukisan Purba Tertua Dunia



SULTRA, BP- Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara kini memiliki lukisan purba tertua di dunia setelah hasil penelitian ilmiah terbaru menetapkan lukisan cadas di Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, berusia sekitar 67.800 tahun. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Museum dan Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (11/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Fadli Zon meninjau berbagai koleksi Museum Negeri Sulawesi Tenggara sekaligus memberikan arahan mengenai pengembangan museum agar menjadi pusat edukasi, pelestarian budaya, dan destinasi wisata yang mampu mengangkat kekayaan sejarah Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kebudayaan didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Akmad Wiyagus dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka. Ketiganya berkeliling meninjau ruang pamer, fasilitas museum, serta koleksi yang menjadi representasi perjalanan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Saat melakukan peninjauan, Fadli Zon mengamati secara rinci koleksi yang dipamerkan kepada masyarakat. Museum Negeri Sulawesi Tenggara saat ini mengelola sebanyak 5.333 koleksi yang terdiri atas benda-benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, hingga filologi. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 koleksi dipamerkan di ruang pamer tetap, sedangkan sisanya masih berada di ruang penyimpanan.

"Kita memiliki bukti peradaban yang sangat tua. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lukisan purba di Liangkobori berusia sekitar 67.800 tahun sehingga Sulawesi Tenggara kini memiliki lukisan purba tertua di dunia," ujar Fadli Zon.

Penetapan usia lukisan purba tersebut didasarkan pada hasil penelitian Griffith University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sejumlah lembaga pelestarian kebudayaan yang diumumkan pada Januari 2026. Temuan ilmiah itu sekaligus menggeser rekor sebelumnya yang dipegang kawasan Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan, sebagai lokasi lukisan purba tertua di dunia.

Menurut Fadli Zon, capaian tersebut bukan sekadar kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara, melainkan juga menjadi bukti penting bahwa Nusantara memiliki posisi strategis dalam sejarah perkembangan manusia modern dan seni

prasejarah dunia.

"Warisan budaya ini harus dijaga bersama karena nilainya bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari peradaban dunia," katanya.

Untuk memperkuat fungsi museum, Menteri Kebudayaan meminta agar dilakukan penataan ulang ruang pamer sehingga lebih komunikatif dan menarik bagi pengunjung. Ia juga mengusulkan pemasangan replika lukisan purba Liangkobori pada area luar maupun dinding museum agar identitas museum semakin kuat sekaligus menjadi daya tarik visual bagi wisatawan.

Selain itu, Fadli Zon mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan sektor swasta guna mendukung revitalisasi museum secara berkelanjutan.

"Revitalisasi museum harus dilakukan melalui kolaborasi semua pihak sehingga museum menjadi pusat pembelajaran, pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata yang hidup," ujarnya.

Museum Negeri Sulawesi Tenggara sendiri baru saja meningkatkan status akreditasinya dari kategori C menjadi kategori B. Peningkatan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola museum, pelayanan publik, hingga pengembangan koleksi agar lebih mudah diakses masyarakat.

Secara historis, Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu pusat seni cadas dunia. Selama bertahun-tahun, kawasan karst Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan menjadi rujukan internasional setelah penelitian pada 2014 menunjukkan keberadaan lukisan gua berusia lebih dari 40 ribu tahun. Namun, hasil penelitian yang diumumkan pada Januari 2026 menempatkan lukisan cadas Liangkobori di Kabupaten Muna sebagai temuan yang lebih tua dengan usia sekitar 67.800 tahun. Temuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu wilayah terpenting dalam kajian evolusi manusia dan perkembangan seni prasejarah dunia, sejajar dengan situs-situs bersejarah di Eropa, Australia, dan Afrika yang selama ini menjadi pusat penelitian arkeologi internasional.

Usai menyelesaikan agenda di Kendari, Menteri Kebudayaan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Muna dan Kota Baubau. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri pembukaan Festival Liangkobori ke-IV di Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus mempromosikan potensi sejarah Sulawesi Tenggara kepada masyarakat nasional dan dunia. (MASHURI)

Bupati Buton Tengah Azhari Tekankan Inovasi Kades Hadapi Keterbatasan Fiskal Daerah



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP - "Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong pemerintah desa untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Dana Desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menginstruksikan seluruh kepala desa agar lebih proaktif mengakses berbagai program pembangunan dan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di desa.

Arahan tersebut disampaikan Azhari saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo, Selasa (7/7/2026). Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Armin, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten, tenaga ahli pendamping desa, seluruh camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Buton Tengah.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, desa dituntut membangun jejaring komunikasi yang lebih luas dengan kementerian, pemerintah provinsi, hingga anggota legislatif asal Buton Tengah agar peluang memperoleh bantuan

pembangunan semakin terbuka.

"Saya menginstruksikan seluruh kepala desa agar lebih inovatif dan proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, maupun anggota legislatif. Dana Desa saja sudah tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan desa," kata Azhari di hadapan peserta rakor.

Menurut Azhari, berbagai keterbatasan fiskal justru harus menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kreativitas dalam mencari peluang pembiayaan pembangunan. Ia menilai keberhasilan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan aparat desa membangun kolaborasi lintas pemerintahan.

Rakor tersebut membahas tiga agenda strategis yang menjadi prioritas pemerintah daerah, yakni penegasan batas desa, optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa. Ketiga agenda tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus memberikan kepastian administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

"Penegasan batas desa, pengelolaan keuangan yang baik, dan pembentukan Posbakum Desa merupakan fondasi penting bagi pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel," ujar Azhari.

Bupati juga mengajak seluruh peserta rapat untuk menyukun-

ri sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meskipun kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat mampu menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa proyek strategis yang telah berhasil direalisasikan di antaranya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah, Sekolah Rakyat, Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Pengadilan Agama, hingga pembangunan Kantor Bulet. Seluruh program tersebut merupakan hasil koordinasi intensif pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Apa yang sudah kita raih hari ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas pemerintahan mampu menghadirkan pembangunan meski kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, saya berharap seluruh desa ikut aktif menjemput program-program pembangunan," tegasnya.

Secara historis, kebijakan mendorong desa menjadi lebih mandiri dalam mengakses sumber pembiayaan bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam merencanakan pembangunan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Program Dana Desa yang mulai disalurkan pada 2015 telah menjadi salah satu instrumen utama pem-

erataan pembangunan nasional, namun dalam perkembangannya pemerintah juga mendorong desa membangun kemitraan dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, BUMN, maupun sektor swasta untuk memperluas sumber pembiayaan.

Dalam konteks internasional, pendekatan pembangunan berbasis kolaborasi antarpemerintah juga telah diterapkan di berbagai negara.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan sebagai strategi mempercepat pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang mendorong desa lebih aktif memanfaatkan berbagai peluang pendanaan eksternal.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap seluruh pemerintah desa memiliki arah pembangunan yang selaras dengan prioritas daerah. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi berbagai skema pendanaan yang tersedia. (*)

Polres Buton Perkuat Sinergi Lewat ToleRUNsi2 Sambut HUT Bhayangkara ke-80



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Polres Buton menutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan menggelar lomba lari maraton ToleRUNsi2 Bhayangkara 80 Tahun sejauh 10 kilometer di Pasarwajo, Minggu (5/7/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diikuti peserta dari berbagai daerah sebagai wujud penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui olahraga.

Setelah seluruh peserta menyelesaikan perlombaan, kegiatan dilanjutkan dengan senam sehat bersama di Lapangan Mapolres Buton. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika panitia menyerahkan hadiah kepada para juara ToleRUNsi2 10 Km dan mengundi berbagai door-prize yang disambut antusias para peserta.

Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr., mengatakan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang selama ini mendukung setiap rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80.

"Atas nama keluarga besar Polres Buton, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan lomba ToleRUNsi2 10 Km dan seluruh perlombaan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi disiplin, sportivitas, serta kebersamaan," ujar AKBP Ali Rais Ndraha.

Pelepasan peserta sebelumnya dilakukan di depan Mapolres Buton, Jalan 25. Kapolres didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Se-

latan. Menurut Kapolres, ToleRUNsi2 bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan bagian dari upaya mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polres Buton ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang sehat, inklusif, sekaligus memperkuat semangat hidup aktif di tengah masyarakat.

"Melalui momentum HUT Bhayangkara ke-80, Polres Buton berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun kedekatan melalui kegiatan yang bermanfaat, edukatif, dan menyenangkan," kata Kapolres.

Ia menjelaskan, lomba ToleRUNsi2 merupakan salah satu agenda penutup setelah sebelumnya Polres Buton sukses menyelenggarakan sejumlah perlombaan, di antaranya catur, domino, Play-Station, dan bola voli. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari semarak Hari Bhayangkara yang puncaknya diperingati melalui upacara pada 1 Juli 2026.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), panitia pelaksana, personel pengamanan, tenaga kesehatan, sponsor, relawan, hingga masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Semoga sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera," tuturnya.

Tema HUT

Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, yakni "80 Tahun Polri Mengabdikan untuk Masyarakat", menurut Kapolres menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan, pengabdian, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Secara historis, Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli sebagai momentum lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang menempatkan Kepolisian Negara langsung di bawah Perdana Menteri. Sejak itu, Hari Bhayangkara diperingati setiap tahun sebagai refleksi atas perjalanan institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Di tingkat internasional, penyelenggaraan ajang lari jalan raya atau road race telah lama dimanfaatkan banyak negara sebagai media kampanye hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara institusi pemerintah dan masyarakat. Berbagai kepolisian di dunia, seperti di Jepang, Australia, Inggris, hingga Amerika Serikat, secara rutin menggelar kegiatan serupa untuk membangun kedekatan dengan warga melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif.

Pelaksanaan ToleRUNsi2 Bhayangkara 80 Tahun di Kabupaten Buton menjadi cerminan pendekatan tersebut. Selain mendorong gaya hidup sehat, kegiatan ini juga memperkuat semangat persatuan, sportivitas, dan kolaborasi lintas sektor. Antusiasme peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa olahraga mampu menjadi media efektif dalam mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus memperkokoh semangat pengabdian sebagaimana tema HUT Bhayangkara ke-80. (*)

BPOM Resmikan Aturan Baru, Pengawasan Iklan Obat Kini Lebih Ketat



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memperkuat sistem pengawasan promosi dan iklan obat di Indonesia melalui penerbitan Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Promosi dan Iklan Obat. Regulasi baru tersebut diterbitkan sebagai upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari informasi pemasaran obat yang tidak objektif, tidak lengkap, dan berpotensi menyesatkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital serta media komunikasi.

Peraturan tersebut ditandatangani Kepala BPOM Taruna Ikrar pada 16 April 2026 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum pada 29 April 2026. Aturan ini sekaligus menggantikan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat yang selama lima tahun terakhir menjadi acuan dalam pengawasan iklan obat di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa regulasi terbaru disusun untuk memastikan seluruh informasi mengenai obat yang diterima masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Prinsip dari promosi dan iklan obat yang dilakukan harus memenuhi empat hal, yakni objektif, lengkap, tidak menyesatkan, serta mematuhi etika periklanan,” kata Taruna Ikrar.

Menurut BPOM, perubahan regulasi ti-

dak hanya mengikuti perkembangan teknologi informasi, tetapi juga merespons semakin masifnya promosi produk kesehatan melalui platform digital dan media sosial. Karena itu, tanggung jawab pelaku usaha diperkuat agar kegiatan promosi tidak menimbulkan penyimpangan dalam distribusi maupun penggunaan obat.

Dalam aturan tersebut, BPOM membedakan ketentuan promosi berdasarkan kategori obat. Obat yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter hanya boleh dipromosikan melalui media ilmiah yang ditujukan kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sebaliknya, obat tanpa resep dapat dipromosikan kepada masyarakat umum dengan syarat memperoleh persetujuan iklan dari BPOM sebelum dipublikasikan.

Permohonan persetujuan iklan hanya dapat diajukan oleh industri farmasi pemilik izin edar. Pedagang besar farmasi, fasilitas pelayanan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF), maupun fasilitas lainnya yang ingin melakukan promosi wajib bekerja sama dengan industri farmasi pemilik izin edar obat.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa materi promosi harus memuat informasi yang sesuai dengan izin edar sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat, indikasi, hingga peringatan penggunaan obat.

“Informasi yang disampaikan tidak boleh

menimbulkan kesalahpahaman ataupun memberikan gambaran yang keliru kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, promosi juga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun tokoh masyarakat dengan tujuan memenangkan penggunaan obat tertentu.

“Promosi dan iklan obat harus disampaikan secara jujur, bertanggung jawab, serta sesuai norma kepatutan,” tegas Taruna Ikrar.

Salah satu perubahan penting dalam PerBPOM Nomor 7 Tahun 2026 adalah penambahan sejumlah larangan yang sebelumnya belum diatur secara rinci. BPOM melarang pemberian contoh obat kepada masyarakat, pemberian bonus berupa obat maupun sediaan farmasi lainnya, potongan harga atau komisi yang berlebihan, hingga penggunaan fitur komunikasi dua arah di media sosial sebagai sarana transaksi jual beli obat.

Regulasi tersebut juga secara tegas membatasi keterlibatan influencer maupun individu dalam promosi obat. Mereka tidak diperbolehkan melakukan promosi ataupun publikasi obat, kecuali hanya tampil sebagai pemeran dalam materi iklan yang telah memperoleh persetujuan dari BPOM.

Selain memperketat pengawasan, BPOM juga menetapkan masa transisi bagi pelaku usaha. Permohonan persetujuan iklan yang diajukan sebelum aturan baru berlaku tetap diproses menggunakan

PerBPOM Nomor 2 Tahun 2021. Sementara seluruh persetujuan iklan yang telah diterbitkan wajib menyesuaikan dengan regulasi terbaru paling lambat 12 bulan sejak PerBPOM Nomor 7 Tahun 2026 diundangkan.

Taruna Ikrar mengingatkan seluruh industri farmasi, pedagang besar farmasi, fasilitas pelayanan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik farmasi, dan fasilitas lain agar mematuhi ketentuan tersebut.

“Jika melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, atau pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik,” katanya.

Penyusunan regulasi ini telah berlangsung sejak tahun 2025 melalui serangkaian tahapan mulai dari penyusunan rancangan, pembahasan internal, konsultasi publik, hingga harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan kementerian/ lembaga terkait. Dalam proses konsultasi publik, BPOM menerima 162 butir masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), asosiasi industri farmasi, serta pelaku industri farmasi.

Pengawasan terhadap promosi obat di Indonesia telah berkembang secara bertahap sejak pembentukan BPOM sebagai lembaga independen pada 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, pemerintah memperbaiki berbagai regulasi pengawasan obat, termasuk menerbitkan PerBPOM Nomor 2 Tahun 2021 yang kini disempurnakan melalui PerBPOM Nomor 7 Tahun 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan konsumen serta mendorong penggunaan

Gerakan Cegah Stunting di Buton Targetkan Prevalensi Turun Jadi 14,2 Persen

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Cegah Stunting dan Cek Kesehatan Gratis yang digelar di Pelataran Perkantoran Takawa, Kamis (2/7/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-23 Pasarwajo sebagai ibu kota Kabupaten Buton itu menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Gerakan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T., yang hadir mewakili Bupati Buton. Selain menghadirkan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, kegiatan juga diisi penandatanganan deklarasi komitmen pencegahan stunting oleh berbagai unsur pemerintah dan mitra pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga.

“Masalah stunting di Kabupaten Buton merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Penanganannya membutuhkan sinergisitas, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan,” kata Syarifudin Saafa saat membacakan sambutan Bupati Buton.

Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Buton masih berada pada angka 28,8 persen. Sementara itu, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 20,94 persen.

Meski menunjukkan tren penurunan, pemerintah daerah menilai capaian tersebut masih berada di atas target yang diharapkan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah bersama para pemangku kepent-

ingan diminta meningkatkan efektivitas program pencegahan agar target prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.

“Target tersebut hanya bisa diwujudkan melalui gerakan pencegahan stunting yang dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar mantan legislator tersebut.

Sebagai bagian dari inovasi edukasi kesehatan, Wakil Bupati juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

“Di era digital seperti sekarang, edukasi akan lebih efektif apabila memanfaatkan media digital, misalnya melalui pemutaran video singkat tentang pencegahan stunting di sekolah sebelum kegiatan belajar dimulai,” katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan dr. H. Muh. Hayyun, M.Kes., Sp.A. sebagai narasumber. Hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat Pasarwajo, para lurah, kepala desa, serta unsur masyarakat lainnya.

Usai pembukaan, seluruh pemangku kepentingan menandatangani deklarasi atau pernyataan komitmen Gerakan Cegah Stunting sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Buton.

Wakil Bupati kemudian meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Gedung B Takawa. Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan preventif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.

Secara historis, penanganan stunting mulai menjadi agenda prioritas nasional melalui gerakan yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dunia pendidikan, hingga keluarga. Pemerintah Kabupaten Buton berharap upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan dalam mewujudkan generasi Buton yang sehat, cerdas, dan unggul.(*)

obat secara aman dan rasional.

Di tingkat global, pengawasan promosi obat telah lama menjadi perhatian berbagai otoritas kesehatan. World Health Organization (WHO) sejak 1988 menerbitkan Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion yang menjadi rujukan banyak negara dalam mengatur promosi obat secara etis. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA) secara ketat

mengawasi iklan obat resep melalui Office of Prescription Drug Promotion. Sementara di kawasan Uni Eropa, promosi obat diatur melalui berbagai direktif yang membatasi iklan obat resep kepada masyarakat umum. Kebijakan BPOM melalui PerBPOM Nomor 7 Tahun 2026 dinilai sejalan dengan praktik internasional dalam memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

Dengan diberlakukannya regulasi baru

tersebut, BPOM berharap seluruh pelaku usaha farmasi semakin bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui pengawasan yang lebih ketat, promosi dan iklan obat diharapkan mampu mendukung penggunaan obat yang aman, efektif, rasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat nasional.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Don Ritto Bantah Uang Rp67 M Hasil Penggeledahan, Klaim Dana Investasi Pelabuhan di Kaltim



Handika Honggowongso, kuasa hukum tersangka tiga kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Don Ritto (DR) di Polda Metro Jaya, Selasa (14/7)

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Don Ritto, membantah keterlibatannya dengan uang tunai senilai Rp67,2 miliar yang ditemukan penyidik saat penggeledahan di Kafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer, kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Don Ritto menegaskan uang tersebut merupakan dana kerja sama investasi untuk pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur, bukan hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

Perkara yang menjerat Don Ritto kini telah memasuki babak baru setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU kepada Kejaksaan Agung. Dalam perkara tersebut, Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka dari unsur swasta, sementara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-pidus), Febrie Adriansyah, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara berbeda yang masih berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU.

Kejaksaan Agung menyatakan akan membentuk tim khusus untuk menangani perkara yang menyeret Febrie Adriansyah. Pembentukan tim itu dimaksudkan untuk menjaga independensi penanganan perkara sekaligus meminimalkan potensi konflik kepentingan karena yang bersangkutan

pernah menduduki jabatan strategis di institusi tersebut.

Selain membentuk tim khusus, Kejaksaan Agung memastikan proses hukum akan berlangsung secara transparan, profesional, dan akuntabel. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan untuk memberikan fungsi supervisi agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah proses hukum tersebut, kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menegaskan kliennya tidak memiliki hubungan dengan uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu.

“Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Apakah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan perkara ini? Kami jawab tidak ada hubungan,” kata Handika kepada wartawan, Selasa (14/7).

Handika menilai tuduhan yang mengaitkan Don Ritto dengan uang sitaan tersebut tidak akan mampu dibuktikan apabila perkara bergulir hingga persidangan. Menurutnya, seluruh dalil yang menghubungkan kliennya dengan barang bukti itu akan terpatahkan melalui proses pembuktian di pengadilan.

“Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak,” tegas Handika.

Lebih lanjut, Handika menjelaskan uang senilai Rp67,2 miliar tersebut mer-

upakan dana investasi hasil kerja sama sejumlah pengusaha dengan Don Ritto. Dana itu disebut disiapkan untuk mendukung pembangunan dermaga atau pelabuhan di wilayah Kalimantan Timur.

“Itu adalah kerja sama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri melakukan penggeledahan secara maraton di dua lokasi di Jakarta Selatan. Dari operasi tersebut, penyidik menemukan uang tunai miliaran rupiah beserta sejumlah barang bukti lain yang disimpan dalam sebuah brankas berukuran besar yang disembunyikan di lokasi.

Berdasarkan hasil penyidikan, Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sementara itu, Febrie Adriansyah diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang terkait proses penanganan perkara terhadap oknum penyelenggara negara, termasuk perkara PT Asabri dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum dan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah besar. Dalam praktik penegakan

hukum di Indonesia, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana agar tampak legal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjadi dasar hukum utama dalam penanganan perkara semacam ini.

Secara historis, Indonesia telah menangani sejumlah perkara besar terkait pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, mulai dari kasus BLBI, proyek e-KTP, hingga perkara PT Asabri dan Jiwasraya. Penanganan perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum semakin mengedepankan pendekatan follow the money untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan.

Di tingkat internasional, pemberantasan pencucian uang menjadi agenda utama berbagai negara sejak dibentuknya Financial Action Task Force (FATF) pada 1989. Organisasi tersebut menetapkan standar global dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota penuh FATF pada 2023, sehingga penanganan perkara TPPU kini mendapat perhatian lebih besar dalam rangka memenuhi standar internasional mengenai transparansi sistem keuangan dan penegakan hukum. (*)

UPI Telusuri Dugaan Penipuan Rp100 Juta yang Seret Nama Seorang Dosen



Ilustrasi

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memastikan tengah menindaklanjuti dugaan penipuan yang melibatkan salah seorang dosennya berinisial DS setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Pihak kampus menegaskan proses pemeriksaan dilakukan sesuai mekanisme internal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kepala Kantor Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Publik UPI, Vidi Sukmayadi, mengatakan informasi yang beredar telah diterima pihak universitas dan langsung diteruskan kepada pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“UPI menyampaikan klarifikasi kepada publik terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan yang melibatkan salah seorang dosen di lingkungan UPI,” kata Vidi dalam keterangan tertulis yang dikutip dari detikJabar, Selasa (14/7).

Menurut Vidi, institusi memahami bahwa isu tersebut telah memunculkan perhatian dan kekhawatiran di kalangan sivitas akademika maupun masyarakat. Karena itu, kampus berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

UPI juga menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan dengan menghormati hak setiap pihak yang berkaitan dengan perkara. Universitas tidak akan mengambil kesimpulan sebelum seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilaksanakan.

“Dalam proses-

ya, UPI berkomitmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, sekaligus menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara, termasuk penerapan asas praduga tak bersalah,” ujar Vidi.

Kasus tersebut mencuat setelah unggahan akun Instagram @kabarmahasiswa.id menjadi viral. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa seorang dosen bergelar doktor diduga mengaku telah bercerai, kemudian menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita sebelum meminjam uang sekitar Rp100 juta dengan alasan membiayai kegiatan riset.

Unggahan itu juga menarasikan bahwa dana yang dipinjam hingga kini belum dikembalikan secara lunas dan korban disebut mengalami kesulitan untuk menagih. Informasi tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Meski demikian, dugaan tersebut belum memasuki proses hukum. Kasat Reskrim Polrestaes Bandung, AKBP Anton, menyatakan hingga saat ini kepolisian belum menerima laporan resmi terkait dugaan penipuan tersebut.

“Saya cek dulu ya. Tapi, seingat saya belum ada laporan terkait hal tersebut,” kata Anton saat dikonfirmasi secara terpisah.

Vidi menambahkan, hasil pemeriksaan internal nantinya akan diumumkan melalui saluran resmi universitas setelah seluruh proses selesai. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu jalannya

pemeriksaan.

“Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui kanal resmi setelah proses pemeriksaan tuntas dilaksanakan,” tegasnya.

Secara historis, kasus dugaan pelanggaran etik maupun dugaan tindak pidana yang menyeret oknum tenaga pendidik di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam sejumlah kasus sebelumnya di berbagai perguruan tinggi, penyelesaian umumnya dilakukan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan etik oleh institusi pendidikan dan proses hukum apabila terdapat laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut bertujuan menjaga integritas lembaga pendidikan sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak seluruh pihak.

Di tingkat internasional, berbagai universitas ternama juga menerapkan mekanisme serupa ketika menghadapi dugaan pelanggaran yang melibatkan dosen atau peneliti. Prinsip transparansi, akuntabilitas, investigasi independen, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah menjadi standar yang diterapkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Kasus yang menyeret nama dosen UPI ini hingga kini masih berada pada tahap klarifikasi internal dan belum memasuki proses hukum karena belum adanya laporan resmi kepada kepolisian. Oleh sebab itu, seluruh informasi terkait perkara tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak universitas maupun perkembangan lebih lanjut apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. (*)

Masjid Al-Muttaqin Wajo Bersiap Berwajah Baru dengan Kapasitas Lebih Besar, Wali Kota Yusran Fahim Letakkan Batu Pertama



BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau resmi memulai pembangunan sekaligus rehabilitasi total Masjid Al-Muttaqin di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, melalui prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, Selasa (14/7/2026). Pembangunan tersebut menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menginginkan rumah ibadah yang lebih luas, kokoh, dan mampu menampung lebih banyak jemaah.

Peletakan batu pertama itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Ham-sinah Bolu, M.Sc., Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat Kelurahan Wajo. Kehadiran unsur pemerintah dan masyarakat menjadi simbol dimulainya kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan rumah ibadah tersebut.

Secara teknis, Masjid Al-Muttaqin akan dibangun dengan peningkatan kualitas konstruksi dibandingkan bangunan sebelumnya. Luas bangunan diperbesar menjadi 18 x 24 meter dengan metode konstruksi konvensional serta penggunaan material tiang berkualitas guna menjamin

kekuatan bangunan dalam jangka panjang sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jemaah.

Dengan kapasitas yang lebih besar, masjid ini diproyeksikan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah wajib dan sunah. Ke depan, Masjid Al-Muttaqin juga diharapkan berkembang sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, pembinaan generasi muda, musyawarah warga, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Wajo.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim mengatakan pembangunan tersebut merupakan hasil dari semangat kebersamaan yang telah lama dibangun oleh masyarakat. Menurutnya, aspirasi untuk melakukan renovasi total masjid sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu dan baru dapat direalisasikan setelah seluruh pihak memiliki kesamaan komitmen.

"Rencana renovasi total rumah ibadah ini sebenarnya sudah lama diwacanakan dan sangat dinantikan oleh masyarakat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat memulainya berkat semangat kebersamaan dan gotong royong," ujar Yusran Fahim.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan

pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kekompakan panitia dan masyarakat. Karena itu, seluruh unsur diminta terus menjaga komunikasi serta mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar proses pembangunan berjalan sesuai target.

"Panitia harus mampu menggalang segala kekuatan dan potensi yang ada demi mempercepat proses penyelesaian masjid. Kami berharap masyarakat tetap bersatu dan memberikan dukungan penuh agar pembangunan segera rampung," katanya.

Yusran Fahim juga memastikan Pemerintah Kota Baubau akan terus mengawal pembangunan Masjid Al-Muttaqin hingga selesai. Dukungan pemerintah, kata dia, akan diberikan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Baubau berkomitmen mengawal proses pembangunan ini dengan penuh tanggung jawab, sembari tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Secara historis, pembangunan masjid melalui semangat gotong royong telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, banyak masjid di berbagai daerah

dibangun melalui partisipasi masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan para dermawan. Tradisi tersebut menjadi salah satu kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan serta memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam konteks internasional, fungsi masjid juga mengalami perkembangan yang signifikan. Di berbagai negara seperti Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Inggris, masjid kini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, layanan sosial, perpustakaan, hingga pusat penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial masyarakat modern.

Pembangunan Masjid Al-Muttaqin di Kelurahan Wajo diharapkan menjadi tonggak penguatan nilai-nilai kebersamaan di Kota Baubau. Selain menghadirkan fasilitas ibadah yang lebih layak, proyek ini juga diharapkan menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan yang semakin inklusif, produktif, serta berkelanjutan. (Ardi)

Kejuaraan Angkat Berat Sultra di Baubau Diikuti 11 Daerah Jadi Barometer Pembinaan Atlet Daerah



Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si.

Pewartanya: Firman

BAUBAU, BP- Kota Baubau dipercaya menjadi tuan rumah Kejuaraan Angkat Berat Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang diikuti kontingen dari 11 kabupaten/kota. Kejuaraan yang dipusatkan di Gedung SKOPMA Wajo itu resmi dibuka pada Sabtu (11/7/2026) oleh Wali Kota Baubau yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kompetisi tersebut juga diproyeksikan sebagai seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara di Kendari.

Penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi di Sulawesi Tenggara. Atlet-atlet terbaik yang lahir dari kompetisi tingkat provinsi diharapkan mampu memperkuat kontingen Sulawesi Tenggara pada kejuaraan nasional, sekaligus menjaga regenerasi atlet angkat berat secara berkelanjutan.

Dalam sambutan Wali Kota Baubau yang dibacakan Dr. Mohamad Tasdik, Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan olahraga prestasi melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Menurutnya, kompetisi merupakan instrumen penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet di setiap daerah.

"Kejuaraan ini ada-

lah barometer pembinaan olahraga kita bersama, seberapa jauh kita telah merawat dan mengembangkan potensi atlet daerah," ujar Dr. Mohamad Tasdik saat membacakan sambutan Wali Kota Baubau.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Baubau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh kontingen dari 11 kabupaten/kota. Kehadiran para atlet, pelatih, dan ofisial diharapkan tidak hanya menghadirkan persaingan yang sehat, tetapi juga mempererat hubungan antardaerah di Sulawesi Tenggara.

"Kami berharap kejuaraan ini bukan sekadar arena kompetisi, melainkan juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan semangat sportivitas antar atlet maupun antardaerah," kata Tasdik.

Dalam pesannya kepada para atlet, Wali Kota mengingatkan bahwa keberhasilan di cabang olahraga angkat berat lahir dari proses latihan yang panjang, disiplin, dan ketangguhan mental. Menurutnya, pencapaian prestasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjalani pembinaan.

"Setiap beban yang diangkat di atas platform bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga mencerminkan ketangguhan mental, disiplin, dan hasil latihan yang dijalan selama bertahun-tahun," lanjutnya.

Apresiasi juga diberikan kepada para pelatih dan ofisial yang selama ini menjadi bagian penting

dalam mencetak atlet berprestasi. Wali Kota menilai keberhasilan seorang atlet tidak dapat dipisahkan dari dedikasi para pembina yang terus mendampingi proses latihan hingga memasuki arena pertandingan.

Secara historis, olahraga angkat berat atau powerlifting mulai berkembang pesat di dunia sejak pertengahan abad ke-20 dan kini dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan internasional di bawah naungan International Powerlifting Federation (IPF) yang berdiri pada 1972. Organisasi tersebut menjadi induk penyelenggara kejuaraan dunia dan menetapkan standar pertandingan yang diikuti banyak negara.

Di Indonesia, pembinaan angkat berat terus mengalami perkembangan melalui kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON). Kompetisi tingkat provinsi seperti yang digelar di Baubau menjadi mata rantai penting dalam proses pencarian bibit atlet potensial sebelum tampil pada level yang lebih tinggi, termasuk mewakili daerah di Porprov maupun ajang nasional.

Melalui penyelenggaraan Kejuaraan Angkat Berat Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, Pemerintah Kota Baubau berharap lahir atlet-atlet muda yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga memperkuat posisi Baubau sebagai salah satu daerah yang aktif mendukung pembinaan olahraga prestasi sekaligus penyelenggaraan event olahraga berskala provinsi. (*)